

# RENCANA KERJA BKPSDM

2025

*Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya, Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan penjabaran program/ kegiatan tahunan yang diturunkan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022-2026.

Penyusunan Dokumen Renja-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan dan penganggaran untuk tahun 2025.

Dengan telah disusunnya Dokumen Renja ini, diharapkan dapat membuat arah pembangunan khususnya dibidang Kepegawaian menjadi lebih terarah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah.

Oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan dari semua pihak terhadap penyusunan Rencana Kerja ini, Semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kedamin, Januari 2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya.....	5
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	14
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>37</b>

**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu ..... 6

Tabel 2 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu 2025.. 16

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun RKPD, acuan utama yang digunakan adalah arah dan program Pembangunan Daerah seperti yang dijabarkan dalam dokumen RPJM Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik permasalahan daerah setempat serta berbagai program prioritas pembangunan. Disamping itu, RKPD dalam penyusunannya juga mengacu pada dokumen Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) serta diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi/Nasional. Tujuan merujuk dokumen perencanaan pada tingkat di atasnya dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi dan sinkronisasi kebijakan antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun RENJA-OPD Tahun Anggaran 2025 yang akan dijadikan salah satu acuan penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 serta merupakan dasar penyusunan RKA – OPD/RAPBD Tahun 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang dikompilasi melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD.

RENJA-OPD disusun mengacu dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah bermaterikan rencana kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Kapuas Hulu dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*).

Penyusunan RENJA tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berlaku sejak 1 Januari 2025 dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2025. Rancangan Anggaran OPD yang sekaligus menyajikan pula berbagai potret permasalahan yang dihadapi, program prioritas pembangunan, rencana kegiatan kerja dan pendanaannya serta arah kebijakan keuangan OPD.

Secara garis besar, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 sekaligus berfungsi secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, baik bagi segenap Aparatur Pemerintah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan, pembangunan dalam periode satu tahun kedepan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten kapuas Hulu 2016-2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dokumen sekaligus rujukan utama sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025, yang dilaksanakan secara partisipatif melalui rangkaian program Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu, penyusunan RENJA-OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan program Bupati dalam jangka waktu lima tahun ke depan, dimana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan sudah tergambar dalam rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan berdasarkan Buku Panduan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV. PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA TAHUN SEBELUMNYA

#### 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya

Rencana kerja merupakan rencana tahunan dari rencana strategis, adapun maksud dari penyusunan rencana kerja adalah memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaian dengan tujuan agar kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Dalam pelaporan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan, didukung dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Rencana Kerja (Renja) BKPSDM dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja, hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

**Tabel 1: Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcom)/Kegiatan (Output)	Target	Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			2024	2024	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman	100 %	100,00%	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai dengan pedoman	100 %	100,00%	
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100,00%	
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100,00%	
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100,00%	
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100,00%	
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100,00%	
<b>2.</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>				
	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku</li> <li>Persentase Pemutahiran data kepegawaian</li> </ul>	100 %	87,00% 188,00%	
	2. Mutasi dan Promosi ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Mutasi Pemindehan ASN yang sesuai dengan ketentuan</li> <li>Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat ASN yang diterbitkan tepat waktu</li> <li>Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan</li> </ul>	100 %	90,14% 97,33% 66,06%	
	3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin</li> <li>Persentase Penilaian Kinerja ASN</li> </ul>	100 %	100,00% 91,03%	
<b>3.</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100 %	103,05%	
	2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 %	100,00%	

**A. Indikator Kinerja**

- a. Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku.

**b. Permasalahan**

- Banyak Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Yang Di Tentukan Menpan

**c. Solusi**

Perbaiki Kualifikasi Pendidikan Serta Mengganti Jabatan Baru Yang Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan Menpan.

**B. Indikator Kinerja**

- a. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Displin

**b. Permasalahan**

rangkaian Kegiatan pengadaan masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2025.

**c. Solusi**

Akan dibuat laporan sesuai tahapan proses kegiatan pengadaan.

**C. Indikator Kinerja**

- a. Persentase Penilaian Kinerja ASN

**b. Permasalahan**

Terdapat error penarikan data pada draft SK Pemberhentian di Aplikasi SIASN

**c. Solusi**

Melakukan koordinasi dengan KANREG V BKN dan BKN terkait kendala pada Aplikasi SIASN

**D. Indikator Kinerja**

- a. Persentase Pemutahiran data kepegawaian

**b. Permasalahan**

Dokumen Yang Diupload Peserta Tidak Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan Oleh BKN

**c. Solusi**

Peserta Diminta Kembali Mengupload Dokumen Yang Sesuai dengan Persyaratan

**E. Indikator Kinerja**

**a.** Persentase ASN yang telah memenuhi Kualifikasi Pendidikan

**b. Permasalahan**

- Pelaksanaan Peningkatan Pendidikan Lanjutan ASN yang telah difasilitasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah/Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Triwulan I baru mencapai 7 ASN, sedangkan pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah belum ada. Hal ini disebabkan adanya beberapa ASN yang mengusulkan Tugas Belajar secara mandiri belum memenuhi syarat.
- Pelaksanaan peningkatan pendidikan lanjutan ASN yang telah difasilitasi dan telah ditetapkan SK sampai dengan Triwulan II sebanyak 12 ASN dan ASN yang mengikuti UD & UKPPI Tahun 2024 sebanyak 32 ASN. Pada pelaksanaan ujian dinas ke depannya sudah mewajibkan menggunakan Sistem CAT sehingga pelaksanaan Ujian Dinas sampai dengan tahun 2024 hanya 1 (satu) kali saja.
- Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada Tahun 2024 hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali saja, dan untuk tahun 2025 akan dilaksanakan menggunakan CAT dan perlu bekerja sama dengan UPT Kanreg V BKN di Pontianak terkait pelaksanaan UD & UPKP. Untuk Pendidikan Lanjutan perlu menertibkan ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk Jabatan Fungsional perlu melakukan sosialisasi lanjutan terkait penyusunan PAK bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing.

**c. Solusi**

- Memberikan pemahaman kepada ASN yang mengusulkan Tugas Belajar agar mempelajari aturan terkait peningkatan pendidikan lanjutan melalui Tugas Belajar Mandiri bahwa harus melengkapi persyaratan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku seperti, syarat kualifikasi pendidikan, akreditasi prodi dan syarat lainnya sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- berkoordinasi dan konsultasi dengan Kanreg V BKN Jakarta terkait pelaksanaan ujian dinas untuk tahun 2024 dengan sistem CAT dan mekanisme pelaksanaan mandiri atau kerjasama.
- Menyusun Perencanaan kegiatan dan anggaran pada pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan dan Jabatan Fungsional serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat terencana dan terlaksana dengan optimal

**F. Indikator Kinerja**

a. Persentase ASN yang telah memenuhi Standar Kompetensi ASN

**b. Permasalahan**

- Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang PSDMA sampai pada Triwulan I baru terealisasi sebanyak 8 ASN yang melaksanakan PKA, sedangkan untuk pelaksanaan pelatihan lainnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan II, III dan IV. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kuota pada pihak penyelenggara sehingga jumlah calon peserta yang dikirimkan harus dibagi per angkatan yang mengakibatkan realisasi pada Triwulan I masih kecil.
- Pelaksanaan pengembangan kompetensi di Bidang PSDMA sampai dengan Triwulan II terealisasi sebanyak 9 ASN yang mengikuti PKA, 10 ASN yang mengikuti PKP, 2 ASN mengikuti Pelatihan Fungsional dan 4 ASN mengikuti Latsar CPNS, sedangkan pelaksanaan Orientasi PPPK akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Pelatihan Teknis akan dilaksanakan pada Triwulan IV, hal ini menyebabkan capaian sampai dengan Triwulan II

belum sampai 50% karena capaian terbesar berada di Triwulan III pada Pelaksanaan Orientasi PPPK.

- Selama pelaksanaan Pelatihan Teknis Manajemen Stres yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu dihadiri oleh 17 Peserta namun terdapat ASN yang melaksanakan Pelatihan Teknis di luar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (KDOD) LAN di Samarinda sebanyak 3 orang. Selanjutnya untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional dari target sebanyak 5 ASN yang melaksanakan hanya 3 ASN yang terdiri dari 1 ASN menggunakan Anggaran BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu dan 2 ASN menggunakan Anggaran OPD masing-masing. Untuk pelaksanaan Orientasi PPPK dari target sebanyak 1900 ASN terlaksana sebanyak 1904 ASN. Untuk pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Struktural dari target 45 ASN terealisasi 47 ASN karena ada penambahan usulan dari OPD pada anggaran penyempurnaan namun baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV.

**c. Solusi**

- Alternatif solusi ke depannya, yaitu berkoordinasi dengan pihak penyelenggaran untuk dapat memberikan kuota tambahan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu agar jumlah peserta yang diusulkan dapat diberikan lebih banyak dan pembagian waktunya tidak terlalu banyak.
- Melaksanakan Orientasi PPPK pada Triwulan III dan Pelatihan Teknis pada Triwulan IV, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat mencapai sesuai target dan tepat waktu.
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, baik pada pelatihan kepemimpinan struktural, fungsional, teknis, latsar dan orientasi PPPK dengan sebaik-baiknya termasuk dalam penyusunan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dengan seoptimal mungkin serta meningkatkan kerjasama dengan penyelenggara pengembangan kompetensi, baik di wilayah Provinsi Kalimantan Barat maupun di luar Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**G. Indikator Kinerja**

a. Persentase Pemutahiran data kepegawaian.

**b. Permasalahan**

- Dokumen Yang Diupload Peserta Tidak Sesuai Dengan Yang Diperkirakan Oleh BKN.

**c. Solusi**

- Peserta Diminta Kembali Mengupload Dokumen Yang Sesuai dengan Persyaratan.

**H. Indikator Kinerja**

a. Persentase Mutasi Pemindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan

**b. Permasalahan**

- 1. Usulan Mutasi PNS masih ada yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan kompetensi; 2. PNS tidak memahami ABK dan Anjab sebagai salah satu persyaratan mutasi pindah.
- Mutasi PNS mengabaikan surat pernyataan 5 dan 10 tahun.
- 1. Usulan Mutasi PNS masih ada yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan dan kompetensi; 2. PNS tidak memahami ABK dan Anjab sebagai salah satu persyaratan mutasi pindah.

**c. Solusi**

- Melakukan sosialisasi/bimtek tentang mutasi pemindahan ASN
- Perlu ditambahkan persyaratan surat keterangan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin dan surat keterangan tidak sedang TUBEL untuk mutasi antar unit kerja.

**I. Indikator Kinerja**

a. Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu.

**b. Permasalahan**

- 1. Lemahnya Pengelola Kepegawaian di OPD sehingga walaupun edaran terkait usulan KP telah dikirimkan 3 bulan sebelum batas waktu penerimaan usul KP masih ada PNS yang terlambat dan tidak diusulkan KP.; 2. Masih ada PNS yang tidak mengusulkan KP karena ketidaktahuan.

- Masih banyak data PNS pada aplikasi SIASN yang belum terupdate (unit kerja, jabatan, pendidikan, gelar, tempat lahir, kppn).

**c. Solusi**

- Melakukan sosialisasi/bimtek tentang Kenaikan Pangkat bagi Kasubag Umum Aparatur/Pengelola KP OPD, mengingat sejak periode april 2023 pengusulan KP telah dilakukan dengan aplikasi baru BKN (SIASN) dan sosialisasi terakhir dilakukan pada tahun 2016.
- Membentuk Tim kerja bersama (MP dan P2DK) dalam melakukan update/peremajaan data dengan menyandingkan data SIMPEG.

**J. Indikator Kinerja**

- a. Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan.

**b. Permasalahan**

- 1. Kurangnya SDM di kecamatan yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural; 2. Pelantikan para Pejabat di Lingkungan Inspektorat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan proses pengusulan ke Instansi di luar Kabupaten Kapuas Hulu.
- Ada beberapa PNS yang tidak hadir pada saat diundang untuk dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

**K. Indikator Kinerja**

- a. Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu.

**b. Permasalahan**

- Kegiatan ini terdiri dari lima sub kegiatan dan untuk capaian realisasi kinerjanya baru tercapai 30%, tidak ada hambatan dan kendala didalam penyelesaian sub kegiatan yg ada dan dari sisi anggaran belum ada realisasinya, namun progresnya sudah ada dan baru bisa diajukan pada triwulan berikutnya.
- Sub kegiatan yang ada didalam masing2 kegiatan sudah dilaksanakan seperti pada triwulan sebelumnya dan proses penyerapan anggaran



sudah ada penyerapannya. Ada pun kendala yang ditemukan bisa diselesaikan melalui koordinasi baik internal maupun eksternal.

- Di lingkungan BKPSDM, monev menjadi tantangan tersendiri karena sering terkendala oleh tingginya beban kegiatan di setiap bidang. Padatnya jadwal kerja serta tanggung jawab yang menumpuk menyebabkan monev, yang seharusnya dilakukan secara rutin, terkadang tertunda. Setiap rekan kerja memiliki kesibukan dan prioritas masing-masing, sehingga kolaborasi dalam monev tidak berjalan maksimal. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan evaluasi program, pengawasan, serta pemantauan kinerja yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu pelayanan dan efektivitas organisasi.
- Dari sub kegiatan yang ada sudah dilaksanakan sesuai target dan terealisasi sehingga pencapaian masing-masing kegiatan terakomodir.

**c. Solusi**

- Akan diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.
- Akan diminalisir progres Penyusunan dokumen, agar lebih efektif dan efisien.
- Solusi untuk permasalahan monev di BKPSDM yang sering tertunda akibat kesibukan masing-masing bidang adalah dengan mengimplementasikan sistem monev berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan monev dilakukan secara fleksibel dan real-time tanpa harus bergantung pada pertemuan fisik. Selain itu, penjadwalan monev bisa lebih terstruktur dengan menetapkan prioritas tugas dan tenggat waktu yang jelas, disertai pengingat otomatis. Setiap bidang juga dapat menunjuk tim kecil atau koordinator khusus untuk monev, sehingga tanggung jawab tidak terbebani oleh tugas harian yang lain.
- Hasil dari evaluasi kegiatan telah menjadi dasar dalam merancang program yang lebih komprehensif, lebih tersusun lagi dalam kontrol semua kegiatan.

## 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan belum sesuai dengan Standar Kompetensi;
2. Belum optimalnya upaya penegakan kode etik dan disiplin PNS;
3. Belum optimalnya pengendalian pengembangan kompetensi PNS melalui Diklat dan pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan;
4. Belum optimalnya pemahaman PNS terhadap pergeseran paradigma PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang DP3 menuju PP Nomor 46 tahun 2011 tentang SKP berbasis kinerja.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2: Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 9.969.410.000,00					Rp 9.969.410.000,00
5 3	KEPEGAWAIAN			Rp 9.969.410.000,00					Rp 9.969.410.000,00
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai RB</li> <li>• Predikat Sakip</li> </ul>	30,10 A	Rp 5.676.748.750,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai RB</li> <li>• Predikat Sakip</li> </ul>	30,10 A	Rp 5.676.748.750,00
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu	100	Rp 34.730.250,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu	100	Rp 34.730.250,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	10 dokumen	Rp 5.714.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	10 dokumen	Rp 5.714.400,00
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana anggaran murni yang tersedia	2 dokumen	Rp 3.009.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana anggaran murni yang tersedia	2 dokumen	Rp 3.009.800,00
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana anggaran perubahan yang tersedia	1 dokumen	Rp 3.022.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana anggaran perubahan yang tersedia	1 dokumen	Rp 3.022.900,00
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersedia	1 dokumen	Rp 3.474.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersedia	1 dokumen	Rp 3.474.500,00
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersedia	1 dokumen	Rp 3.310.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersedia	1 dokumen	Rp 3.310.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	4 Laporan	Rp 5.663.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	4 Laporan	Rp 5.663.500,00
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia	4 Dokumen	Rp 10.535.150,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersedia	4 Dokumen	Rp 10.535.150,00
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu	100 %	Rp 4.359.600.900,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu	100 %	Rp 4.359.600.900,00
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Dokumen	Rp 4.131.123.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Dokumen	Rp 4.131.123.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 224.536.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 224.536.000,00
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tersedia	1 Dokumen	Rp 2.175.900,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tersedia	1 Dokumen	Rp 2.175.900,00
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.766.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 1.766.000,00
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75%	Rp 93.783.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75%	Rp 93.783.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

# 2025

5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Rp 80.600.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Rp 80.600.000,00
5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp 13.183.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Rp 13.183.000,00
5 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 952.828.600,00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan</b>	<b>75%</b>	<b>Rp 952.828.600,00</b>
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 8.780.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 8.780.000,00
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 9.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 9.000.000,00



# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

# 2025

5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan	Rp 13.036.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan	Rp 13.036.500,00
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	Rp 78.658.100,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	Rp 78.658.100,00
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 3.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 3.000.000,00
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 701.354.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 701.354.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 8.400.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 8.400.000,00
5 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Rp 130.600.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Rp 130.600.000,00
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75%	Rp 188.773.500,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75%	Rp 188.773.500,00
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 2.880.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 2.880.000,00
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	Rp 23.701.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	Rp 23.701.500,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

# 2025

		dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan		
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 162.192.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 162.192.000,00
5 03 012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75%	Rp 47.032.500,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	75%	Rp 47.032.500,00
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 33.442.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 33.442.500,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

# 2025

5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	Rp 13.590.000,00		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan	Rp 13.590.000,00
5 03 2	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan</li> <li>Persentase disiplin ASN</li> <li>Persentase Kapasitas Kinerja ASN</li> </ul>	85%  99,90%  83%	<b>Rp 1.732.271.750,00</b>		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan</li> <li>Persentase disiplin ASN</li> <li>Persentase Kapasitas Kinerja ASN</li> </ul>	85%  99,90%  83%	<b>Rp 1.732.271.750,00</b>
5 03 022.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku</li> <li>Persentase Pemutakhiran data kepegawaian</li> </ul>	100%          100%	<b>Rp 521.783.000,00</b>		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pelaksanaan Pengadaan dan Pemberhentian ASN sesuai dengan pedoman yang berlaku</li> <li>Persentase Pemutakhiran data kepegawaian</li> </ul>	100%          100%	<b>Rp 521.783.000,00</b>
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah laporan analisis perkembangan	1 Dokumen	Rp 73.287.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara,	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah laporan analisis perkembangan	1 Dokumen	Rp 73.287.400,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		gan kebutuhan pegawai secara berkala yang tersusun			Semua Kelurahan	ASN	gan kebutuhan pegawai secara berkala yang tersusun		
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi pegawai yang tersusun	1 Dokumen	Rp 142.000.600,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen formasi pegawai yang tersusun	1 Dokumen	Rp 142.000.600,00
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen rekapitulasi berkas permohonan pemberhentian	12 Dokumen	Rp 72.412.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen rekapitulasi berkas permohonan pemberhentian	12 Dokumen	Rp 72.412.000,00
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data atau informasi kepegawaian yang diintegrasikan pada aplikasi atau system		Rp 137.201.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data atau informasi kepegawaian yang diintegrasikan pada aplikasi atau system informasi		Rp 137.201.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		informasi kepegawaian					kepegawaian		
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah pegawai yang diupdate data dan informasi status kepegawaian nya	2500 Data	Rp 96.882.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah pegawai yang diupdate data dan informasi status kepegawaian nya	2500 Data	Rp 96.882.000,00
5 03 022.02	Mutasi dan Promosi ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Mutasi Pemindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat ASN yang diterbitkan tepat waktu</li> <li>• Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Rp 908.894.000,00		Mutasi dan Promosi ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Mutasi Pemindahan ASN yang sesuai dengan ketentuan</li> <li>• Persentase Mutasi Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu</li> <li>• Persentase Pengelolaan Pengembangan Karier dan</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Rp 908.894.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

# 2025

		Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan					Promosi ASN yang sesuai dengan ketentuan		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen bahan mutasi PNS keluar/masuk antar kabupaten dalam provinsi, antar provinsi antar instansi	20 Dokumen	Rp 156.424.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen bahan mutasi PNS keluar/masuk antar kabupaten dalam provinsi, antar provinsi antar instansi	20 Dokumen	Rp 156.424.000,00
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah rancangan surat keputusan kenaikan pangkat ASN	428 SK	Rp 239.664.800,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah rancangan surat keputusan kenaikan pangkat ASN	428 SK	Rp 239.664.800,00
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen laporan/evaluasi pelaksanaan promosi ASN	3 Laporan	Rp 512.805.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen laporan/evaluasi pelaksanaan promosi ASN	3 Laporan	Rp 512.805.200,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5 03 02 2.03	Pengembangan ASN	Kompetensi	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	42 Dokumen	Rp 88.528.500,00		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	42 Dokumen	Rp 88.528.500,00
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Lanjutan ASN	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bahan masukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah dan tugas belajar sesuai persyaratan</li> <li>Jumlah bahan masukan pencantuman gelar hasil PNS tugas belajar</li> <li>Jumlah rancangan surat keputusan Tugas Belajar ASN</li> <li>Jumlah rancangan sertifikat ujian dinas/penyesuaian</li> </ul>	50 Surat  40 Surat  20 Surat  40 Sertifikat	Rp 45.265.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Lanjutan ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bahan masukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah dan tugas belajar sesuai persyaratan</li> <li>Jumlah bahan masukan pencantuman gelar hasil PNS tugas belajar</li> <li>Jumlah rancangan surat keputusan Tugas Belajar ASN</li> <li>Jumlah rancangan sertifikat ujian dinas/penyesuaian</li> </ul>	50 Surat  40 Surat  20 Surat  40 Sertifikat	Rp 45.265.500,00



# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		<ul style="list-style-type: none"> <li>ijazah sesuai ketentuan</li> <li>Jumlah rancangan surat keputusan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah</li> <li>Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas</li> </ul>	<p>1 SK</p> <p>3 Laporan</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>ijazah sesuai ketentuan</li> <li>Jumlah rancangan surat keputusan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah</li> <li>Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas</li> </ul>	<p>1 SK</p> <p>3 Laporan</p>	
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan inventarisir dan klasifikasi data dan informasi ASN Jabatan Fungsional</li> <li>Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sesuai persyaratan</li> </ul>	<p>54 Dokumen</p> <p>5 Dokumen</p>	Rp 43.263.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah laporan inventarisir dan klasifikasi data dan informasi ASN Jabatan Fungsional</li> <li>Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sesuai persyaratan</li> </ul>	<p>54 Dokumen</p> <p>5 Dokumen</p>	Rp 43.263.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah bahan pengangkatan, kenaikan jenjang, pemberhentian sementara dan pembebasan pegawai dalam jabatan fungsional</li> </ul>	300 SK					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah bahan pengangkatan, kenaikan jenjang, pemberhentian sementara dan pembebasan pegawai dalam jabatan fungsional</li> </ul>	300 SK				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen bahan rencana Pelantikan Jabatan Fungsional</li> </ul>	2 Dokumen					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen bahan rencana Pelantikan Jabatan Fungsional</li> </ul>	2 Dokumen				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen laporan fasilitasi/pembinaan jabatan fungsional pada perangkat daerah</li> </ul>	10 Laporan					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen laporan fasilitasi/pembinaan jabatan fungsional pada perangkat daerah</li> </ul>	10 Laporan				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rancangan laporan</li> </ul>	1 Laporan					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rancangan laporan</li> </ul>	1 Laporan				

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		pelaksanaa n tugas					pelaksanaa n tugas		
5 03 022.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin</li> <li>Persentase Penilaian Kinerja ASN</li> </ul>	100%  100%	Rp 213.066.250,00		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin</li> <li>Persentase Penilaian Kinerja ASN</li> </ul>	100%  100%	Rp 213.066.250,00
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi ekinerja	30 Laporan	Rp 74.829.250,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi ekinerja	30 Laporan	Rp 74.829.250,00
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah dokumen data pegawai yang mencapai syarat usia kerja Satya Lencana, surat edaran, persyaratan usulan Satya Lencana		Rp 15.471.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah dokumen data pegawai yang mencapai syarat usia kerja Satya Lencana, surat edaran, persyaratan usulan Satya Lencana	250 orang	Rp 15.471.000,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah data permohonan pengajuan Satya Lencana	250 Orang	Rp 42.805.000,00		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah data permohonan pengajuan Satya Lencana	250 Orang	Rp 42.805.000,00
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan disiplin ASN yang tersedia	10 Laporan	Rp 37.247.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan disiplin ASN yang tersedia	10 Laporan	Rp 37.247.000,00
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah data pelanggaran disiplin ASN yang tersusun	12 Laporan	Rp. 40.787.000,00		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah data pelanggaran disiplin ASN yang tersusun	12 Laporan	Rp. 40.787.000,00
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah rancangan penerbitan ijin cerai sesuai usulan dan ketentuan	3 Dokumen	Rp 1.927.000,00		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah rancangan penerbitan ijin cerai sesuai usulan dan ketentuan	3 Dokumen	Rp 1.927.000,00
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp 2.560.389.500,00					Rp 2.560.389.500,00
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	26%	Rp 2.560.389.500,00		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	26%	Rp 2.560.389.500,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		i							
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100%	Rp 52.626.000,00		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kualifikasi Pendidikan	100%	Rp 52.626.000,00
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi i Teknis</li> <li>Jumlah Laporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi i teknis</li> </ul>	40 Orang  1 Laporan	Rp 51.839.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi i Teknis</li> <li>Jumlah Laporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi teknis</li> </ul>	40 Orang  1 Laporan	Rp 51.839.000,00
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengorganisasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan inventarisir informasi ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembiayaan OPD (diklat	1 Laporan	Rp. 787.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pembinaan, Pengorganisasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan inventarisir informasi ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembiayaan OPD (diklat	1 Laporan	Rp. 787.000,00

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

		teknis)					teknis)		
5 04 022.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target	100%	Rp 2.507.763.500,00		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai target	100%	Rp 2.507.763.500,00

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

2025

5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Dasar CPNS</li> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti orientasi PPPK</li> <li>• Jumlah Laporan Penyelenggaraan orientasi PPPK</li> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan</li> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti Diklat jabatan fungsional</li> <li>• Jumlah MOU PKA dan PKP</li> </ul>	<p>4 Laporan</p> <p>1750 orang</p> <p>1 Laporan</p> <p>48 orang</p> <p>9 orang</p> <p>3</p>	Rp 2.470.854.500,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Dasar CPNS</li> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti orientasi PPPK</li> <li>• Jumlah Laporan Penyelenggaraan orientasi PPPK</li> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan</li> <li>• Jumlah ASN yang mengikuti Diklat jabatan fungsional</li> <li>• Jumlah MOU PKA dan PKP</li> </ul>	<p>4 Laporan</p> <p>1750 orang</p> <p>1 Laporan</p> <p>48 orang</p> <p>9 orang</p> <p>3</p>	Rp 2.470.854.500,00
-----------------	---	--	---	---------------------	---	---	--	---	---------------------

# RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

# 2025

5 04 02 2.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi</li> <li>Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi</li> </ul>	5 kegiatan  100 orang	Rp. 36.909.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi</li> <li>Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi</li> </ul>	5 kegiatan  100 orang	Rp. 36.909.000,00
TOTAL				Rp 9.969.410.000,00	TOTAL				Rp 9.969.410.000,00



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam wujud dokumen/buku Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran penuh, yakni mulai awal tahun hingga akhir tahun 2025.

Adapun Dokumen Renja-OPD Tahun 2025 ini menjelaskan perihal prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus program tahun 2025 beserta sasaran, arah kebijakan dan berbagai indikasi kegiatan untuk mencapainya, serta menjelaskan pula perihal kerangka ekonomi pembangunan OPD. Dalam dokumen Rencana Kerja ini juga menguraikan seluruh program kegiatan pembangunan Tahun 2025 dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk perkiraan pagu indikatif yang akan ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, diharapkan dapat memperlancar arus informasi dan komunikasi bidang Kepegawaian sehingga secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi segenap institusi/organisasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengelolaan manajemen Kepegawaian terutama dalam mengoptimalkan pemberdayaan aparatur yang ada dalam lingkungan instansinya.

Kedamin,     Januari 2025